

Bongkar Septic Tank Rumah Aborsi, Polisi Siapkan Stoples Sampai Truk Sedot Tinja

JAKARTA (IM) - Polres Metro Jakarta Pusat membongkar tangki pembuangan atau septic tank di rumah aborsi ilegal di Kemayoran, Senin (3/7). Ini adalah lanjutan dari Rabu lalu setelah polisi menggerebek rumah yang berlokasi di Jalan Mirah Delima IV Nomor 14 Kelurahan Sumur Batu tersebut.

Saat itu polisi menangkap tiga tersangka pelaku aborsi dan mendapati empat orang pasiennya. Dari hasil pemeriksaan diketahui janin-janin yang dihancurkan dari pengguguran kehamilan di rumah itu selalu dibuang ke kloset kamar mandi.

Berdasarkan pantauan, dari sisi timur rumah telah disiapkan sebuah truk sedot tinja. Pada bagian depan rumah dipasang atap dan dibuat area steril, diperkirakan untuk penyidik dan dokter dari kedokteran forensik serta DVI Polri bekerja nanti.

Sebuah meja juga disiapkan di depan rumah. Di atasnya tampak belasan stoples plastik, saringan mi ukuran

sedang dan besar, tiga buah baskom, dan peralatan yang dimiliki DVI Polri di dalam koper. Lalu tersedia alat penyedot beserta kabel rol di depan teras rumah yang terletak di dekat septic tank.

Polisi saat ini tengah berada di dalam rumah untuk berkoordinasi dengan pejabat lingkungan setempat, seperti pengurus RT dan kelurahan. Terlihat pula dua perempuan yang menjadi tersangka di dalam rumah.

Pembongkaran septic tank akan dilakukan oleh Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta. Mereka sudah bersiap untuk membongkar teras rumah.

Rumah aborsi di Kemayoran disebutkan kepolisian memasang tarif Rp 2,5 juta hingga Rp 8 juta, tergantung usia kandungan, terhadap para pasiennya. Praktik sudah berjalan kurang lebih selama satu bulan, sedangkan pelaku mengontrak rumah itu sejak April 2023. Jumlah pasien diperkirakan sudah 50-an perempuan. ● yan

Pemprov DKI Diminta Perbanyak Waduk

JAKARTA (IM) - Normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono setelah sebelumnya dihentikan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, meskipun dilanjutkan, normalisasi berjalan lambat. Tahun ini, pekerjaan fisik normalisasi baru dimulai di Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur sepanjang 500 meter. Akibatnya, Jakarta masih akan dibayang-bayangi oleh banjir dalam waktu beberapa tahun ke depan.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Hariwan Paloh menyebut ingin agar Pemprov DKI dapat memaksimalkan peran waduk untuk menampung limbah air.

“Jadi perbanyak dulu waduk. Kan ada beberapa lahan aset BUMD yang belum digunakan rencananya akan digunakan sebagai waduk,” ujar Nova, Senin (3/7).

Pemprov DKI Jakarta juga memiliki waduk-waduk yang sudah dibangun sebelumnya dan bisa dimaksimalkan seperti Waduk Kampung Rambutan, Waduk Pondok Ronggon, dan Waduk Brigif.

Optimalisasi waduk sudah dicontohkan oleh pemerintah pusat melalui pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Kedua waduk itu berperan mengurangi volume air Kali Ciliwung dari hulu. “Sehingga untuk di hilirnya pun kita harus bisa mengurangi,” pungkasnya. ● yan

Pemprov Diminta Sediakan Rusunawa untuk Warga Kapuk Muara

JAKARTA (IM) - Warga Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dikabarkan telah bertempat tinggal lama di rumah yang berada di atas tumpukan sampah. Legislator meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menyediakan rusunawa untuk para warga yang tinggal di tempat yang kurang layak tersebut.

“Memang harus kita akui bahwa rusunawa masih sangat diperlukan. Memang dari Komisi D selalu mendorong pemerintah untuk membangun rusunawa dibanding DP nol rupiah atau lain sebagainya,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/7).

Ida mengatakan, ada banyak masyarakat yang tinggal di tempat tidak layak di Ibu Kota. Warga di Kapuk Muara itu hanya salah satunya. Pemprov DKI harus memberikan atensi yang lebih

pada nasib mereka. Menurut dia, opsi rusunawa yang bisa digunakan oleh para warga, yakni Rusunawa Nagrek di Cilincing, Jakarta Utara.

“Untuk saat ini memang rusunawa yang masih banyak yang kosong di Nagrek, Cilincing. Memang lumayan jauh, tapi saya yakin kalau fasilitas dilengkapi, masyarakat yang tinggal secara tidak layak di kolong tol, kolong jembatan, dan di Kapuk Muara, mereka mau, sekali lagi dengan catatan jika fasilitas dilengkapi,” ujar politikus PDIP itu.

Disinggung berapa banyak idealnya jumlah rusunawa yang dibutuhkan, Ida mengatakan, belum mengetahuinya. “Kalau soal berapa kebutuhan kita belum ada data bahkan dari Dinas Perumahan pun mereka belum mendata secara lengkap. Karena banyak yang tinggal di kolong jembatan, kolong tol, dan lain-lain masih banyak yang bukan merupakan warga DKI,” kata Ida. ● yan

Normalisasi Kali Ciliwung Sampai ke Cililitan, Pembebasan Lahan 7 Kelurahan Dikebut

JAKARTA (IM) - Normalisasi Kali Ciliwung terus berlanjut. Tahun ini pemerintah prioritaskan pembebasan lahan di tujuh kelurahan termasuk Rawajati, Cawang, dan Cililitan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) telah memulai pemasangan turap atau ‘sheetpile’ di Kelurahan Cililitan. Menurut dia, di kelurahan tersebut terdapat bidang lahan yang sudah bebas di sepanjang 500 meter di pinggir Kali Ciliwung.

“Lahan yang sudah siap itu. Sudah dimulai oleh BBWSCC,” kata Yusmada di Balai Kota, Senin (3/7). Pembebasan lahan di Kelurahan Cililitan untuk normalisasi telah dilakukan tahun lalu. Sementara itu, untuk pembebasan lahan tahun ini diprioritaskan di tujuh kelurahan

seperti Rawajati, Cawang, dan Cililitan.

Yusmada mengatakan pembebasan lahan di tujuh kelurahan masih belum tuntas karena berbagai hal. “Ya ini kita terus bahas dengan BPN hal-hal yang berkaitan dengan itu,” ujarnya.

Menurut dia, masih cukup banyak lahan belum bebas. Salah satu tantangan untuk membebaskan lahan antara lain tidak lengkapnya sertifikat kepemilikan tanah. “Masih banyak. Ada 150 bidang di Rawajati. Di Cawang juga terus kita kejar. Di Cawang ada 200 bidang,” jelas Yusmada.

Yusmada menambahkan, tahun ini ada Rp470 miliar anggaran APBD DKI yang dialokasikan untuk pembebasan lahan. Ia pun optimistis seluruh anggaran tersebut dapat terserap untuk membebaskan lahan bagi normalisasi Kali Ciliwung. ● yan

4|Metropolis

IDN/ANTARA



Pemprov DKI Diminta Evaluasi Pemasangan Teknologi AI di Lampu Merah

“Evaluasi dinilai harus dilakukan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikeluarkan untuk pemasangan teknologi guna mengurai kemacetan tidak sia-sia,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono.

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono meminta Dinas Perhubungan untuk segera mengevaluasi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di lampu lalu lintas persimpangan jalan Jakarta.

Untuk diketahui, sudah ada 20 teknologi AI yang terpasang di lampu lalu lintas persimpangan jalan Jakarta sejak April 2023. “Apakah

ini sifatnya uji coba atau permanen. Kalau itu uji coba saya kira uji cobanya segera dilakukan evaluasi,” ujar Gembong saat dikonfirmasi, Senin (3/7).

Evaluasi dinilai harus dilakukan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikeluarkan untuk pemasangan teknologi guna mengurai kemacetan tidak sia-sia.

“Katakanlah bulan (Juni) kemarin sebelum itu dipasang,

kemacetan di DKI Jakarta itu seperti apa. Pas sudah dipasang seperti apa, yang tahu persis itu Dishub,” ucap Gembong.

Gembong sendiri mengaku belum merasakan dampak dari pemasangan teknologi yang disebut mengurai kemacetan di Ibu Kota. Ia mengaku masih merasakan kemacetan saat berangkat dari rumah menuju kantor DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Perjalanan dari Kebayoran Lama sampai kantor ini tidak ada perubahan apa-apa. Artinya kalau katakalah di Sudirman-Thamrin dipasang kan saya tahu ada perubahan signifikan atas perubahan terpasangnya itu untuk mengurai kemacetan,” ucap Gembong.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo sebelumnya

mengatakan, teknologi AI yang telah dan akan terpasang itu dapat mengatur durasi lampu lalu lintas. Pengaturan lampu lalu lintas dengan menambah durasi lampu hijau itu dilakukan secara otomatis dari yang selama ini dilakukan secara manual.

“Traffic light (yang terinstal AI) ini akan melihat kaki simpang mana yang padat sehingga di sana yang akan diberikan prioritas (lampu) hijau lebih banyak,” ucap Syafrin.

Syafrin mengatakan, penerapan pengaturan durasi lampu melalui teknologi AI cukup berdampak bagi lalu lintas sehingga bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. “Sore hari misalnya, ternyata dari Jakarta Utara yang padat menuju Jakarta Selatan. Maka, kaki simpang sisi di Jakarta Utara akan diberikan waktu (lampu hijau) lebih panjang, sehingga antrian di simpang bisa dihindari,” urai Syafrin.

Berdasarkan data Dishub DKI, berikut merupakan 20 simpang jalan di Ibu Kota

PELUNCURAN JURAGAN DOKU UNTUK DUKUNG UMKM

CEO DOKU Chris Yeo (kanan), Plh Deputi Bidang UKM Kemendikbud RI Rulli Nuryanto (kiri), dan pelaku UMKM Anindwitya Rizqi Monica (tengah) menunjukkan aplikasi Juragan DOKU usai peluncuran di Jakarta, Senin (3/7). DOKU meluncurkan aplikasi tersebut untuk mempercepat proses digitalisasi UMKM di Indonesia sekaligus membantu peningkatan transaksi dan perluasan pasar pelaku UMKM nasional.

UANG RP100 JUTA TERANCAM HILANG

Guru Ngaji Mau Beli Mobil Diduga Jadi Korban Penipuan

TANGSEL (IM) - Seorang guru ngaji asal Jakarta Timur, Januar Supriatna, mengadakan penipuan yang dialaminya ke Markas Polres Kota Tangerang Selatan, Januari menerima rekening bukan atas nama si pemilik yang ditemuinya itu. “Disuruh transfer tapi bukan ke rekening dia, trannya ke rekening milik DTH,” ujarnya.

Januar mengaku memastikan kembali ihwal nama di rekening tersebut. Jawab yang diterima adalah penegasan bahwa nama dalam rekening tersebut merupakan saudara atau kerabat si pemilik. “Saya transfer 100 juta karena dia bilang itu nomer rekening milik saudaranya,” kata Januar.

Di sinilah masalah mulai muncul. Pemilik menolak menyerahkan unit mobil sekalipun transfer dana sudah di-

lakukan. Alasannya, uang belum masuk. Si pemilik kukuh meski Januar menunjukkan bukti transaksi. Karena tak kunjung menemui penyelesaian, Januar memutuskan mengadu ke Markas Polres Kota Tangerang Selatan atas kasus penipuan.

“Kami sudah lapor sejak April lalu tapi sampai sekarang belum juga ditangani,” kata Januar menunjuk berkas laporan kasus dugaan penipuan dengan nomor TBL/B/807/IV/2023/SPKT/Polres Tangsel/Polda Metro Jaya.

Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan dari kepolisian. Juru bicara Polres Kota Tangerang Selatan, Ipda Galih Dwi Nuryanto, belum merespons permintaan penjelasan atas pengaduan Januar itu. ● yan

DPRD Jakarta Dukung Pengadaan Mobil Listrik Jadi Mobil Dinas Pemda

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengapresiasi rencana peralihan kendaraan dinas pemerintah daerah ke kendaraan atau mobil listrik. Ia menilai hal tersebut bisa menjadi percontohan bagi masyarakat.

“Kalau bukan dari Pemda dulu yang memulai ya siapa? Jadi solusi pertama memang harus mengganti dulu kendaraan kita jadi listrik,” kata Ida saat dihubungi, Senin (3/7).

Menurut Ida, penggunaan mobil listrik lebih mudah dan efisien. Dia membandingkan mengisi ulang baterai mobil listrik jauh lebih murah daripada mengisi bensin pada mobil konvensional.

“Untuk beli bensin dan charge listrik ini kan bedanya sangat jauh,” ujar dia.

Namun, Ida menyebut peralihan mobil dinas ke kendaraan listrik juga jangan sampai memboroskan anggaran. Ia mengatakan mobil listrik untuk dinas yang di-

beli tidak harus yang mewah dan harganya mahal. “Ada juga mobil listrik yang tidak mahal.”

Selain itu, Ida mengatakan semangat peralihan mobil dinas ke mobil listrik ini bisa dijadikan sebagaiendorong pemda dan masyarakat untuk mengurangi polusi di Jakarta. “Semangatnya bukan karena murah, tapi kita harus mengurangi polusi,” ujar politikus PDIP ini.

Meski begitu, Ida mengakui peralihan mobil listrik untuk masyarakat tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ia mengatakan peralihan mobil listrik di masyarakat harus dilakukan secara bertahap.

“Ya memang kalau bicara masyarakat kita pelan pelan saja,” katanya sambil menambahkan, untuk masyarakat, pemda masih harus menggenjot peningkatan kualitas transportasi umum.

Sebelumnya, Pejabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengumumkan rencana peralihan mobil dinas dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Rencana itu, menurut dia, sudah masuk Rencana Pembangunan Daerah.

“Dalam waktu dekat, realisasi kendaraan berbasis energi terbarukan akan dijalankan,” kata Heru. ● yan



RUMAH WARGA TERDAMPAK LONGSOR

Foto udara warga melihat kondisi rumah yang terdampak longsor di Pasir Putih, Depok, Jawa Barat, Senin (3/7). Longsor yang melanda satu rumah serta mengancam lima rumah lainnya di RT3 RW 2 Kelurahan Pasir Putih itu bermula dari sampah TPA Cipayung yang jatuh ke Kali Pesanggrahan menyumbat aliran air sehingga berbelok mendekati tanah area pemukiman yang berada di pinggir kali.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS - LB) KEDUA PT SUMBER INDOKEMJAYA

Dengan ini Direksi dari PT SUMBER INDOKEMJAYA (selanjutnya disebut Perseroan) menyampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) Pertama yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 dan telah diumumkan di dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 12 Juni 2023 No. 11298 TAHUN XXXVIII di halaman 10 dan Koran International Media tanggal 12 Juni 2023 di halaman 4 dan mengingat tidak tercapainya quorum kehadiran untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) Pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah disampaikan dalam RUPS - LB Perseroan, maka Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) Kedua Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Juli 2023
Waktu : 11.00 WIB - selesai
Tempat : PT SUMBER INDOKEMJAYA - Jakarta

Agenda Rapat : Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan dan usaha Perseroan

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat 8 huruf b Pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 4 Juli 2023
Direksi
PT SUMBER INDOKEMJAYA

TELAH HILANG

Sertifikat Hak Milik No.01478/Jombang A.n Imam Dewanto (Toto Iman Dewanto) seluas 2.415 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.01479/Jombang A.n Imam Dewanto (Toto Iman Dewanto) seluas 3.655 m2, letak tanah di Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (dahulu Kab. Tangerang).